

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI: IMPLIKASI BAGI KESETARAAN SOSIAL

Nordianus Wilfridus¹), Masduki Ahmad²), Heni Rochimah³), (1Universitas Negeri Jakarta), (2Universitas Negeri Jakarta), (3 Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam As-Syafiiyah)

Alamat Email: (1a20wilfrid@gmail.com), Alamat Email: (2masduki@unj.ac.id) Alamat Email: (3henirochimah.fkip@uia.ac.id)

Abstract

Higher education is a strategic instrument for promoting social mobility and national development. However, inequality in access due to uneven funding policies poses a serious challenge to achieving social equity. This article evaluates higher education funding policies in Indonesia through a literature review, focusing on BOPTN, KIP-K, and UKT schemes. The findings indicate the persistence of structural and socio-economic barriers that exclude vulnerable groups. Policies have not fully ensured social equity due to disparities in resource distribution, transparency, and implementation effectiveness. Reform grounded in social justice and enhanced monitoring systems is needed. This research contributes to the development of an inclusive and equitable higher education policy.

Keywords: *higher education funding, social equity, public policy, education access*

Abstrak

Pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis dalam mendorong mobilitas sosial dan pembangunan nasional. Namun, ketimpangan akses akibat kebijakan pembiayaan yang tidak merata menjadi tantangan serius dalam menciptakan kesetaraan sosial. Artikel ini mengevaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia melalui studi literatur dengan fokus pada skema BOPTN, KIP-K, dan UKT. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk meningkatkan aksesibilitas,

masih terdapat hambatan struktural dan sosial-ekonomi yang menyebabkan eksklusi kelompok rentan. Kebijakan belum optimal menjamin kesetaraan sosial karena distribusi sumber daya, transparansi, dan efektivitas implementasi yang bervariasi. Reformasi berbasis keadilan sosial dan penguatan sistem monitoring diperlukan. Studi ini berkontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan adil.

Kata-kata Kunci: pembiayaan pendidikan tinggi, kesetaraan sosial, kebijakan publik, akses pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan tinggi adalah bagian penting dari pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif. Pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan tinggi, individu memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan struktural dan mencapai mobilitas sosial yang lebih luas (UNESCO, 2020).

Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, di antaranya adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kebijakan-kebijakan ini

dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. UKT, misalnya, menetapkan biaya kuliah yang lebih terjangkau berdasarkan kemampuan finansial mahasiswa, sehingga diharapkan dapat mendorong lebih banyak siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Namun, meskipun ada upaya dari pemerintah, data nyata menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan akses yang signifikan terhadap pendidikan tinggi. Latar belakang budaya, sosial ekonomi, dan geografis menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan individu untuk mengakses pendidikan tinggi.

Misalnya, siswa dari daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan dalam hal transportasi, infrastruktur, dan ketersediaan informasi mengenai pendidikan tinggi. Selain itu, stigma sosial dan norma budaya di beberapa komunitas juga dapat menghalangi individu, terutama perempuan, untuk melanjutkan pendidikan mereka (World Bank, 2019).

Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan tinggi dapat memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus berupaya mengatasi tantangan ini dengan merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, penyediaan beasiswa yang lebih luas, serta program-program yang mendukung kesadaran dan motivasi masyarakat untuk melanjutkan

pendidikan tinggi (Asian Development Bank, 2020).

Dengan demikian, pendidikan tinggi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Mewujudkan akses yang lebih adil dan merata terhadap pendidikan tinggi adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (OECD, 2021).

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi literatur sistematis. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia serta implikasinya terhadap kesetaraan sosial secara mendalam dan komprehensif.

Studi literatur sistematis adalah proses yang terstruktur dan terencana untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis

berbagai sumber sekunder, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah valid, terpercaya, dan relevan dengan isu yang sedang diteliti.

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Peneliti akan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik terkait dengan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi dan dampaknya terhadap kesetaraan sosial. Pertanyaan ini akan menjadi panduan dalam proses pencarian literatur.

2. Pencarian Literatur

Peneliti akan melakukan pencarian literatur di berbagai database akademik, perpustakaan, dan sumber online lainnya. Kata kunci yang relevan akan digunakan untuk menemukan artikel dan dokumen

yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Seleksi Sumber

Setelah mengumpulkan literatur, peneliti akan melakukan seleksi untuk menentukan sumber-sumber yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria ini dapat mencakup relevansi, kualitas metodologis, dan tanggal publikasi.

4. Analisis dan Sintesis

Peneliti akan menganalisis temuan dari literatur yang terpilih, mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada. Sintesis informasi ini akan membantu peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi mempengaruhi kesetaraan sosial di Indonesia.

5. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan sintesis yang dilakukan, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi dan

memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi literatur sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia, serta implikasinya terhadap kesetaraan sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Skema Pembiayaan

UKT digunakan untuk menyesuaikan biaya kuliah dengan kemampuan keuangan mahasiswa, tetapi studi menunjukkan masih banyak ketidaktepatan penetapan. Karena kekurangan dokumen verifikasi, banyak mahasiswa memiliki ekonomi rendah bahkan menengah kebawah menghadapi UKT yang tinggi. Karena berbasis data DTKS, KIP-K lebih tepat

sasaran, namun menurut Yuliani & Prabowo (2023), masih ada keterbatasan pembiayaan untuk mendukung dan masih ada ketimpangan distribusi wilayah.

1.1. Pengertian UKT

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah skema pembiayaan pendidikan tinggi yang dirancang untuk menyesuaikan biaya kuliah dengan kemampuan keuangan mahasiswa. Tujuan utama dari UKT adalah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih adil bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi.

1.2. Masalah Penetapan UKT

Meskipun UKT bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembiayaan pendidikan, banyak studi menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam penetapan UKT. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain:

- a) **Kekurangan Dokumen Verifikasi:** Banyak mahasiswa yang tidak dapat menyediakan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan status ekonomi mereka. Hal ini menyebabkan penetapan UKT yang tidak akurat,

di mana mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi rendah atau menengah ke bawah sering kali dikenakan UKT yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

- b) **Keterbatasan Data:** Data yang digunakan untuk menentukan UKT sering kali tidak lengkap atau tidak akurat, sehingga menyebabkan penetapan UKT yang tidak tepat.
- c) **Kurangnya Transparansi**
Proses penetapan UKT sering kali tidak transparan, sehingga mahasiswa tidak dapat memahami bagaimana UKT mereka ditentukan.

1.3. KIP-K sebagai Alternatif

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program yang lebih tepat sasaran dalam memberikan bantuan pendidikan. Program ini berbasis pada data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang memungkinkan penyaluran bantuan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Meskipun KIP-K lebih efektif dalam menargetkan penerima bantuan, masih terdapat beberapa tantangan:

- a) **Keterbatasan Pembiayaan**

Menurut Yuliani & Prabowo (2023), meskipun KIP-K lebih tepat sasaran, masih ada keterbatasan dalam jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Hal ini dapat membatasi kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

- b) **Keterbatasan Akses:** KIP-K hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga masih ada mahasiswa yang tidak dapat mengakses program ini.

1.4. Ketimpangan Distribusi Wilayah

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh skema pembiayaan ini adalah ketimpangan distribusi wilayah. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap skema pembiayaan, sementara daerah lain masih mengalami kesulitan. Ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam kesempatan pendidikan bagi mahasiswa di berbagai lokasi.

1.5. Solusi

Untuk meningkatkan efektivitas skema pembiayaan UKT dan KIP-K, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

a) **Perbaikan Sistem Verifikasi Data**

Pemerintah dapat memperbaiki sistem verifikasi data untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk menentukan UKT dan KIP-K akurat dan lengkap.

b) **Peningkatan Transparansi**

Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam proses penetapan UKT dan KIP-K, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana UKT dan KIP-K mereka ditentukan.

c) **Peningkatan Akses**

Pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap skema pembiayaan UKT dan KIP-K, sehingga lebih banyak mahasiswa dapat mengakses program ini.

2. Ketimpangan Akses dan Partisipasi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa Angka

Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi masih rendah di kuintil ekonomi bawah. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam akses dan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung.

Mahasiswa dari daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) menghadapi berbagai tantangan yang menghambat mereka untuk mengakses pendidikan tinggi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

a. **Transportasi**

Aksesibilitas transportasi yang terbatas menjadi salah satu kendala utama bagi mahasiswa di daerah 3T. Banyak dari mereka yang harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai perguruan tinggi, dan sering kali tidak memiliki sarana transportasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan biaya tambahan dan waktu yang terbuang, yang pada gilirannya dapat mengurangi

motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan.

b. Teknologi

Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, mahasiswa di daerah 3T sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses internet dan perangkat teknologi yang diperlukan untuk mengikuti perkuliahan, terutama dalam konteks pembelajaran daring. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja.

c. Informasi

Kurangnya akses terhadap informasi mengenai peluang pendidikan tinggi juga menjadi hambatan signifikan. Banyak siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang program studi, beasiswa, dan jalur pendaftaran di

perguruan tinggi. Hal ini dapat menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

d. Dukungan Sosial dan Budaya

Selain faktor-faktor di atas, dukungan sosial dan norma budaya di komunitas juga dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Di beberapa daerah, terdapat stigma atau pandangan negatif terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi perempuan, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan.

Penelitian oleh Carnoy et al. (2012) menyoroti bahwa ketimpangan dalam akses pendidikan tinggi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi cenderung memiliki keterampilan

yang lebih rendah dan peluang kerja yang terbatas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi, memperluas akses teknologi, serta menyediakan informasi yang lebih baik tentang pendidikan tinggi dapat membantu mengurangi ketimpangan akses dan partisipasi, sehingga lebih banyak individu dari kuintil ekonomi bawah dapat meraih kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Ketepatan Sasaran dan Transparansi

Ketepatan sasaran dan transparansi dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerimaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi dapat diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, saat ini, proses tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

a. Proses Penetapan UKT yang Tidak Transparan

Penetapan UKT di banyak perguruan tinggi sering kali tidak dilakukan secara transparan. Mahasiswa dan orang tua mereka tidak selalu mendapatkan informasi yang jelas mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan besaran UKT. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan mahasiswa, terutama bagi mereka yang merasa bahwa biaya yang ditetapkan tidak mencerminkan kemampuan finansial mereka. Tanpa transparansi dalam proses ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan pendidikan tinggi dapat menurun.

b. Kurangnya Pemahaman tentang Proses Banding UKT

Proses banding UKT, yang memungkinkan mahasiswa untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan biaya kuliah, sering kali tidak dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui

bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan banding atau tidak memahami prosedur yang harus diikuti. Hal ini dapat mengakibatkan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan biaya kuliah yang lebih rendah tidak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga menghambat akses mereka ke pendidikan tinggi.

c. **Kebutuhan akan Sistem Pelaporan dan Verifikasi Berbasis Data Nasional**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa diperlukan sistem pelaporan dan verifikasi yang berbasis data nasional untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penetapan UKT dan penerimaan KIP-K. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pemerintah dan perguruan tinggi dapat lebih mudah mengidentifikasi mahasiswa yang berhak menerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Data yang akurat dan terkini juga akan

membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebijakan pembiayaan pendidikan.

d. **Dampak Ketidakpastian terhadap Mahasiswa**

Ketidakpastian dalam proses penetapan UKT dan penerimaan KIP-K dapat berdampak negatif pada mahasiswa. Mahasiswa yang tidak yakin tentang biaya kuliah yang harus mereka bayar atau tentang kelayakan mereka untuk menerima KIP-K mungkin merasa tertekan dan cemas, yang dapat mempengaruhi kinerja akademis mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa mengenai hak dan kewajiban mereka.

e. **Pentingnya Keterlibatan Stakeholder**

Untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran, keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk mahasiswa, orang tua, dan masyarakat, sangat penting. Melibatkan mereka dalam proses

pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi umpan balik dapat membantu menciptakan sistem yang lebih responsif dan akuntabel.

4. Evaluasi Keadilan Distribusi Bantuan

Distribusi BOPTN lebih banyak dialokasikan ke PTN besar di Jawa (Setiawan & Fadilah, 2022). Ketimpangan fiskal ini menyebabkan beban biaya kuliah di luar Jawa lebih tinggi. Perlu afirmasi berbasis wilayah dengan pemberian kuota bantuan khusus dan pembangunan asrama mahasiswa.

5. Perbandingan Internasional

Australia menggunakan model pinjaman yang bergantung pada pendapatan (HELP), yang memungkinkan mahasiswa membayar setelah mereka bekerja. Malaysia menggabungkan pinjaman PTPTN dan subsidi negara, dan Jerman menawarkan pendidikan tinggi gratis di universitas negeri mereka (Chapman & Higgins, 2018). Praktik ini membantu Indonesia mengembangkan

model pembiayaan yang berkelanjutan dan adil.

6. Peran Swasta dan Alternatif Pembiayaan

Sektor swasta di Indonesia belum banyak berperan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Dukungan melalui CSR, beasiswa industri, dan crowdfunding masih sporadik (Nugroho, 2021). Diperlukan insentif fiskal dan regulasi yang mendorong kontribusi sektor swasta.

7. Tantangan Implementasi

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Integrasi Data Sosial Ekonomi Antar Lembaga Belum Optimal

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah kurangnya integrasi data sosial ekonomi antara berbagai lembaga pemerintah. Data yang terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dapat menghambat pemahaman yang komprehensif

tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, sulit untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi. Misalnya, informasi mengenai penerima beasiswa, kondisi ekonomi, dan latar belakang pendidikan tidak selalu tersedia secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Rendahnya Kapasitas Manajemen Kebijakan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Banyak Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal kapasitas manajemen kebijakan. Sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pelatihan, dan pengalaman dalam mengelola program-program pembiayaan pendidikan dapat mengakibatkan implementasi kebijakan yang tidak efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai unit di dalam perguruan tinggi juga dapat

menghambat pelaksanaan program-program yang dirancang untuk meningkatkan akses dan partisipasi mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

c. Ketimpangan Fiskal Antar Wilayah

Ketimpangan fiskal antara wilayah juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan pendidikan tinggi. Beberapa daerah, terutama yang lebih maju secara ekonomi, memiliki anggaran pendidikan yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya untuk mendukung pendidikan tinggi. Sebaliknya, daerah yang kurang berkembang sering kali mengalami keterbatasan anggaran, yang berdampak pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas. Ketimpangan ini dapat memperburuk kesenjangan dalam akses pendidikan tinggi, di mana mahasiswa dari daerah kaya memiliki lebih banyak peluang dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah miskin.

d. Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, seperti fasilitas fisik yang kurang baik, laboratorium yang tidak lengkap, dan akses internet yang terbatas, juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan tinggi. Keterbatasan ini dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa, terutama di daerah terpencil.

e. Resistensi terhadap Perubahan

Implementasi kebijakan baru sering kali menghadapi resistensi dari berbagai pihak, termasuk staf pengajar, administrasi, dan bahkan mahasiswa itu sendiri. Perubahan dalam sistem pembiayaan, kurikulum, atau metode pengajaran dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran, yang dapat menghambat penerimaan dan keberhasilan kebijakan tersebut.

f. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat, terutama di daerah terpencil, sering kali kurang menyadari tentang kebijakan dan program yang tersedia untuk mendukung pendidikan tinggi. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang manfaat pendidikan tinggi dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut.

g. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang terpaksa beradaptasi dengan pembelajaran daring, yang tidak semua mahasiswa dapat akses dengan baik. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan yang sudah ada dan menghambat upaya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kebijakan yang lebih inklusif dan

responsif terhadap kebutuhan lokal, serta peningkatan kapasitas manajemen di perguruan tinggi, akan sangat penting untuk mencapai tujuan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.

8. Rekomendasi Kebijakan

1. Perluasan cakupan KIP-K termasuk kebutuhan non-akademik
2. Pengembangan skema pembayaran berbasis penghasilan
3. Transparansi proses UKT dan penyediaan sistem banding
4. Integrasi data DTKS, Dapodik, dan PD-DIKTI
5. Afirmasi wilayah 3T: beasiswa lokasi, asrama, transportasi
6. Insentif dan regulasi untuk peran sektor swasta

Kesimpulan

Studi ini menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di

Indonesia mencapai kemajuan signifikan melalui penerapan UKT dan program KIP Kuliah. Namun, untuk mencapai kesetaraan sosial yang komprehensif, masih terdapat berbagai tantangan, terutama ketidaktepatan sasaran, minimnya transparansi, dan kurangnya dukungan kebutuhan non-akademik mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih perlu memperkuat sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Implikasi kebijakan penting berupa reformasi sistem UKT, perluasan bantuan pendidikan, integrasi data sosial ekonomi nasional, afirmasi wilayah tertinggal, dan pengembangan skema pembiayaan alternatif.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pendidikan nasional agar prinsip keadilan sosial dapat direalisasikan secara nyata.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN.
- BPS. (2022). *Statistik Pendidikan Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chapman, B., & Higgins, T. (2018). Income-contingent loans: Theory, practice and prospects. *Journal of Economic Policy Reform*, 21(3), 203–222.
- DOAJ. (2024). Directory of Open Access Journals. Retrieved from <https://www.doaj.org>
- Fitriani, R., & Sulaiman, M. (2020). Transparansi penetapan UKT di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 45–60.
- Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. New York: Columbia University Press.

- Harjanto, T. (2019). Ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia: Sebuah tinjauan geografis. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 7(2), 134–148.
- Johnstone, D. B. (2004). The economics and politics of cost sharing in higher education. *Comparative Education Review*, 48(4), 403–425.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi*.
- Lestari, I. (2021). Evaluasi implementasi KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 66–78.
- Nugroho, Y. (2021). Peran CSR dalam pembiayaan pendidikan tinggi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(2), 123–135.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rizqi, F., & Andini, M. (2022). Analisis ketimpangan UKT dan efektivitas KIP Kuliah. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 9(1), 23–38.
- Setiawan, A., & Fadilah, N. (2022). Distribusi BOPTN dan ketimpangan antar wilayah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(3), 205–217.
- Simanjuntak, D. (2023). Pendidikan tinggi untuk daerah 3T: Strategi afirmasi dan tantangannya. *Jurnal Pembangunan Regional*, 5(1), 90–103.
- Susanti, R. (2020). Akses mahasiswa miskin terhadap pendidikan tinggi: Studi evaluatif program KIP-K. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 56–68.
- Wahyudi, A., & Nirmala, L. (2021). Kesenjangan akses pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 89–105.

World Bank. (2021). *Rethinking tertiary education financing in Indonesia*. Washington, DC: World Bank Group.

Yuliani, F., & Prabowo, H. (2023). Peran data terpadu dalam pembiayaan pendidikan tinggi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(2), 145–157.

Yusof, H., Ahmad, S., & Latif, R. A. (2020). Financing higher education in Malaysia: The role of PTPTN. *Asian Education Studies*, 5(1), 37–46.